

**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 September 2020/Khusus - Akhir Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
UNIT KERJA : BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
SUB UNIT KERJA : BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **BUDIMAN**
2. Jabatan : **KEPALA BADAN**
3. NHK : **206938**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. **1.950.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 2000 m²/200 m² di KAB / KOTA LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 2000 m²/200 m² di KAB / KOTA LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 91 m²/50 m² di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **122.500.000**

1. MOBIL, CHEVROLET JEEP Tahun 1984, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
2. MOTOR, SUZUKI SEPEDA MOTOR Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000
3. MOBIL, PROTON MINIBUS Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. **78.800.000****D. SURAT BERTAHAPAN** Rp. **---****E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. **33.412.100****F. HARTA LAINNYA** Rp. **---****Sub Total** Rp. **2.184.712.100****III. HUTANG** Rp. **248.000.000****IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. **1.936.712.100**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id.



Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **24 September 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.